

Cerdas Respon Kunker Kajati

SINGKAWANG- Laskar Anti Korupsi Indonesia secara tegas member aplus langkah Kajati Kalbar menyemangati kajari dalam menangani beberapa kasus korupsi yang masih menggantung.

"Intinya kunjungan kerja Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar, Jasman Panjaitan beberapa hari lalu itu harus disikapi dengan cerdas oleh kejari," kata Ketua DPD LAKI Kota Singkawang Mu'in dalam rilisnya, Ahad (20/11).

Menurut Mu'in, khusus untuk Singkawang saja baru satu dari empat kasus yang dilaporkan pihaknya maju di pengadilan tipikor. Kasus yang dimaksud yakni ALBN (Antar Lintas Batas Negara) yang dialokasikan dalam APBD Perubahan 2008 sebesar Rp4 miliar. Sedangkan yang lain seperti kasus Peraturan Wali Kota Singkawang nomor 08 tahun 2008 hingga kini buram. Sebagaimana Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kata Mu'in, dirasakan cukup untuk menindak lanjutnya pada proses pidana. Penggiat anti korupsi di Singkawang ini mengatakan, dari audit BPK pada 2008 terdapat 50 kasus penyimpangan keuangan di Singkawang. Kejaksaan, kata dia, harus bertindak menyikapinya.

"Termasuk Perwako 08 tahun 2008. Sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya. Padahal jelas melanggar ketentuan," paparnya.

Dijelaskan Mu'in, Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, menyatakan

APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksana APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

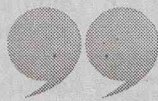
"Di pasal 16 ayat 4 begitu bunyinya. Sedangkan Wali Kota Singkawang mengubah APBD hanya dengan perwako. Ini jelas melanggar hukum," ucapnya. Terkait kunker Kajati Kalbar beberapa hari lalu, Mu'in yang juga anggota International Force Against Corruption (IFAC) ini mengakui tidak terlalu banyak berbicara dalam forum yang dilaksanakan pada saat itu.

"Saya yakin dari laporan LAKI selam ini sudah cukup, Pak Kajati sudah tahu kebobrokan di Singkawang ini, memproses kasus-kasus tersebut bukan ranah LAKI," tegasnya. Lebih lanjut dia mengingatkan, berdasarkan identifikasi LAKI, ada lima titik rawan operandi kejahatan korupsi.

Yakni sektor pengadaan barang dan jasa, perizinan, intervensi politik dalam penyusunan anggaran, penerimaan negara pajak dan bukan pajak serta korupsi sektor keuangan dan perbankan.

"Dari hasil pertemuan kajati di Singkawang beberapa hari lalu itu LAKI berharap lima titik rawan operandi kejahatan korupsi benar-benar menjadi perhatian aparat penegak hukum terlebih kejaksaan."

"Laporan resmi LAKI sudah mencakup. Contohnya kantor wali kota yang baru itu, kajari harus hati-hati. Jangan melihat semut di seberang lautan tampak, tapi melihat gajah di pelupuk mata tak tampak," katanya menyindir. (zrf)



Intinya kunjungan kerja Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar, Jasman Panjaitan beberapa hari lalu itu harus disikapi dengan cerdas oleh kejari.

Mu'in